

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A. Hamid S Attamimi, 1979, *Materi Muatan Perundang-Undangan*, Lokakarya Pengembangan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- , *Hukum Tata Pemerintahan*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018.
- Abdul Aziz Hakim, 2015 *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*, Cet. II, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Sosiologis dan Filosofis)*, Gunung Agung, Jakarta.
- Achmad Ruslan, 2013, *Teori dan Panduan Praktif Pembentukan Peraturan Perundang-Undang di Indonesia*, Rangkang Education, Yogyakarta.
- Ahmad Redi, 2019, *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Cet. II, Sinar Grafika, Jakarta.
- Aminuddin Ilmar, 2014, *Membangun Negara Hukum Indonesia*, Phinatama, Makassar.
- Andi Irman Putra, 2008, *Peran Prolegnas dalam Perencanaan Pembentukan Hukum Nasional Berdasarkan UUD 1945 (Pasca Amandemen)*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2008, Jakarta.
- Azhary, 1995, *Negara Hukum Indonesia: Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-Unsurnya*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.

Aziz Syamsudin, 2013, *Proses dan Teknik Penyusunan Undang-Undang*, Cet. I, Sinar Grafika, Jakarta.

Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 2014 *Evaluasi Prolegnas Tahun 2010-2014*, Jakarta.

Badan Legislasi DPR RI, 2019, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Jakarta.

Badan Legislasi DPR RI, *Daftar Program Legislasi Nasional RUU Tahun 2015-2019*, Bahan Rapat, Jakarta, 6 November 2019.

Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2008, *Tiga Dekade Prolegnas dan Peran BPHN*, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Keputusan DPR RI tentang Daftar Prolegnas Jangka Menengah dan Prolegnas Prioritas Tahunan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia periode 2005-2009.

Hamzah Halim dan Kemal Redindo Syahrul Putera, 2013, *Cara Praktis Menyusun dan Merancang Peraturan Daerah (Suatu Kajian Teoretis dan Praktis Disertai Manual) Konsepsi Teoretis Menuju Artikulasi Empiris*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.

I Gede Pantja Astawa dan Suprin Na'a, 2008, *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan*, Cet. I, PT. Alumni, Bandung.

- Irwansyah, 2020, *Penelitian Hukum “Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel”*, Cet. III, Mirra Buana Media, Yogyakarta.
- Jimly Assiddhiqie, 2012, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta Timur.
- Jumadi, 2017, *Dasar dan Teknik Pembentukan Perundang-Undangan*, PT. Raja Grafindo Persada, Depok.
- Kusumadi Pudjosewojo, 2004, *Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Maria Farida Indrati S, 2007, *Ilmu Perundang-undangan, Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*, Kanisius, Yogyakarta.
- Mexsasai Indra, 2011, *Dinamika Hukum Tata Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Moh. Mahfud MD, 2012, *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Mukhlis Thaib, 2017, *Dinamika Perundang-Undangan di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Mukti Ali, 2020, *Perbandingan Konsep Negara Hukum*, Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta.
- Putera Astomo, 2019, *Ilmu Perundang-Undangan: Teori dan Praktik di Indonesia*, Cet. II, Rajawali Press, Depok.
- Ridwan HR, 2007, *Hukum Administrasi Negara*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

- Roeslan Saleh, 1979, *Penjabaran Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam Perundang-Undangan*, Aksara Baru, Jakarta.
- Romi Librayanto, 2018, *Makna Pemenuhan Kebutuhan Hukum Masyarakat dalam Materi Muatan Undang-Undang*, Setangkai Bunga Rampai: MD Kahmi, Makassar.
- Rosyid Al Atok, 2015, *Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Teori, Sejarah, dan Perbandingan Dengan Beberapa Negara Bikameral*, Setara Press, Malang.
- Syahrhan Basah, 1986, *Perlindungan Hukum terhadap Sikap Tindak Administrasi Negara*, Universitas Padjadjaran, Bandung.
- Yuliandri, 2010, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik, Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan*, Cet. II, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Jurnal

- Ananta Hamas Metana dan Lusy Liany, *Urgensi Naskah Akademik dalam Mewujudkan Peraturan Perundang-undangan Yang Baik*, Lex Jurnalica, Volume 17 Nomor 1, April 2020.
- Fitriani Ahlan Sjarif, *Gaya Perumusan Kalimat Perintah Pembentukan Peraturan Yang Menjalankan Delegasi Dari Undang-Undang Di Indonesia*, Pakuan Law Review Volume 3 Nomor 2, Juli-Desember 2017.

- Madaskolay Victoris Dahoklory, *Menilik Arah Politik Perubahan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Jilid 50 No.2, April 2021.
- Meirina Fajarwati, *Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Program Legislasi Nasional*, Jurnal Kajian Menjembatani Teori dan dan Persoalan Masyarakat Dalam Perumusan Kebijakan, Volume 22 Nomor 3, 2017.
- Mia Kusuma Fitriani, *Peranan Politik Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Negara*, Jurnal Legislasi, Volume 12 Nomor 2, 2015.
- Monika Suhayati dan Shanti Dwi Kartika, *Agenda DPR RI Tahun 2019–2024: Carry-over RUU dan Omnibus Law*, Parliamentary Review, Volume 1 Nomor 4, 2019.
- Muldan Halim Pratama, *Persoalan Desain Kebijakan Carry Over dalam Pembentukan Undang-Undang di Indonesia ditinjau dari Aspek Politik Hukum*, Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam, Volume 10 Nomor 1, April 2020.
- Nur Ghenasyarifa Albani Tanjung dan Fitriani Ahlan Sjarif, *Politik Hukum Carry Over Rancangan Undang-Undang dalam Sistem Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*, Jurnal Legislasi Indonesia Volume 19 Nomor 1, Maret 2022.

Rizdiana Izzaty, *Urgensi Ketentuan Carry Over dalam Pembentukan Undang-Undang di Indonesia*, Jurnal HAM, Volume 11 Nomor 1, April 2020.

Sopiani dan Zainal Mubaroq, *Politik Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasca Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 17 Nomor 2, Juni 2020.

Sugiman, *Fungsi Legislasi DPR Pasca Amandemen UUD NKRI 1945*, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Volume 10 Nomor 2, Fakultas Hukum Dirgantara Marsekal Suryadarma, Maret 2020.

Suriyati Hasan, *Sistem Perencanaan Pembangunan dalam Penataan Hukum Nasional (Suatu Kajian Terhadap Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional)*, Meraja Journal, Volume 1 Nomor 3, November 2018.

Karya Ilmiah/ Disertasi

A. Hamid S. Attamimi, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan*, Disertasi, Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 1990.

Muhammad Fadli, *Hakikat Prolegnas Dalam Mewujudkan Perencanaan Pembentukan Undang-Undang yang Baik di Indonesia*, Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2021.

Muslimah, *Politik Hukum Program Legislasi Nasional dalam Pembentukan Undang-Undang*, Disertasi, Universitas Hasanuddin, 2018.

Peraturan Perundang-Undangan

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1/DPR RI/II/2019-2020 tentang Program Legislasi Nasional RUUPrioritas Tahun 2020, ditetapkan dengan memperhatikan Keputusan Rapat Paripurna DPR ke-8 tanggal 22 Januari2020.

KeputusanDewan Perwakilan Rakyat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Prolegnas Prioritas Tahun 2022 dan Perubahan Kedua Prolegnas Jangka Menengah 2020-2024. <http://baleg-sk-prolegnas-prioritas-perubahan-2021-1637137524.pdf>

Keterangan Tambahan DPR RI terhadap Permohonan Nomor 64/PUU-XVIII/2020, *Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentangPertambangan Mineral dan Batubara terhadap Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945*.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Keterangan DPR RI yang Termuat Dalam PutusanNomor 96/PUU-XVIII/2020, terkait Uji Formil dan Materil Undang-Undang Nommor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi.

Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Program Legislasi Nasional.

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Undang-Undang.

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024.

Permohonan Uji Formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Nomor 60/PUU-XVIII/2020.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-XVIII/2020 terkait Uji Formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Internet

Aminuddin Kasim, "Proses Pembentukan Undang-Undang Pasca Pergeseran Kekuasaan Legislatif Dari Presiden ke DPR", <http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/AKTUALITA/article/download/2479/1622>, diakses pada tanggal 27 April 2021.

Arbain, "Evaluasi Prolegnas 2015-2019", Indonesian Parliamentary Review <https://ipc.or.id/evaluasi-terhadap-program-legislasi-nasional-2015-2019-dewan-perwakilan-rakyat-1/>, diakses pada tanggal 29 Mei 2022.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, "Carry Over RUU Bisa Dilakukan Berdasarkan Kebutuhan", <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/27223/t/javascript>, diakses pada tanggal 15 Juli 2021.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, "DPR Sahkan RUU Bea Meterai, Tarif Menjadi Rp. 10.000,-", <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/30270/t/DPR+Sahkan+RUU+Bea+Meterai%2C+Tarif+Jad+Rp+10.000>, diakses pada tanggal 29 Mei 2022.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, "Keputusan Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005-2006", http://berkas.dpr.go.id/jdih/document/peraturan_dpr/perdpr28_2005_08_DPR_RI_I_2005_2006, diakses pada tanggal 27 Mei 2022.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, "Kronologis Penyusunan dan Pembahasan RUU Minerba", <https://www.dpr.go.id/dokakd/>

dokumen/K7-RJ-20200515-103121-1462.pdf, diakses pada tanggal 24 Mei 2022.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, “Laporan Komisi XI DPR RI Terhadap RUU tentang Bea Meterai dalam Rapat Paripurna DPR RI tanggal 29 September 2020”, <https://www.dpr.go.id/doksetjen/dokumen/persipar-Laporan-AKD-Laporan-Komisi-XI-terhadap-RUU-tentang-Bea-Meterai-Dalam-Rapat-Paripurna-1635305959.pdf>, diakses pada tanggal 29 Mei 2022.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, “Paripurna DPR Sahkan RUU Minerba Menjadi UU”, <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/28748/t/Paripurna+DPR+Sahkan+RUU+Minerba+Jadi+UU>, diakses pada tanggal 26 Maret 2022.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, “Paripurna DPR Sahkan RUU Minerba Menjadi Undang-Undang”, <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/28748/t/Paripurna+DPR+Sahkan+RUU+Minerba+Jadidi+UU>, diakses pada tanggal 06 April 2022.

Dwi Hadya Jayani, “Berapa Anggaran Legislasi DPR Periode 2014-2019”, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/10/01/berapa-anggaran-legislasi-dpr-periode-2014-2019>, diakses pada tanggal 17 Juli 2021.

Kamus Lengkap id, Kamus Lengkap, <https://kamuslengkap.id/kamus/inggris-indonesia/arti-kata/carry-over/>, diakses pada tanggal 07 Maret 2022.

Kementerian Hukum dan HAM, “DPR Sahkan Perubahan UU Mahkamah Konstitusi”, https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=1353:hari-ini-dpr-sahkan-perubahan-uu-mahkamah-konstitusi&catid=111&Itemid=179, diakses pada tanggal 06 April 2022.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia, “RUU Bea Meterai disepakati sebagai RUU prioritas tahun 2020 yang sifatnya carry over dan berbagai cluster materi antara DPR dengan pemerintah, maka pembahasan RUU Bea Meterai akan dibahas antara Komisi XI DPR bersama pemerintah dalam rapat Panitia Kerja (Panja)”, <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/ruu-bea-meterai-lanjut-dibahas-dengan-dpr/>, diakses pada tanggal 28 Mei 2022.

Marlinda Oktavia Erwanti, DPR Bakal Sahkan Aturan Untuk “*Carry Over*” RUU yang Belum Rampung, Detik News, 2019, <https://news.detik.com/berita/d-4711251/dpr-bakal-sahkan-aturan-untuk-carry-over-ruu-yang-belum-rampung>, diakses tanggal 08 April 2022.

Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI, “Alur Penyusunan dan Pembentukan Undang-Undang dan Dukungan Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR”, <https://pusatpuu.dpr.go.id/tentang/alur-penyusunan-ruu>, diakses pada tanggal 06 April 2022.

Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI, "RUU tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi", <https://pusatpuu.dpr.go.id/simas-puu/detail-na/id/76>, diakses pada tanggal 06 April 2022.

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Pembahasan RUU Terkatung-katung, Solusi *Carry Over* Diperjuangkan, <https://pshk.or.id/media-rr/pembahasan-ruu-terkatung-katungsolusi-carryoverdiperjuangkan/>, diakses pada tanggal 23 Juli 2021.

Ryan Puspa Bangsa, *Gatra.Com*, "*Carry Over* RUU Diatur UU 15/2019, Pengamat: Wajib dilakukan", <https://www.gatra.com/news-457164-hukum-carry-over-ruu-diatur-uu-152019-pengamat-wajib-dilakukan.html>, diakses pada tanggal 17 November 2021.